

# PEMAHAMAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA GURU AKUNTANSI SMK NEGERI PROGRAM KEAHLIAN AKUNTANSI KOTA MAKASSAR

**Nabila Wahab, Sahade, Samsinar**  
Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Makassar  
Email: [nabilawhb11@gmail.com](mailto:nabilawhb11@gmail.com)

---

**Abstrack.** This study aims to determine the understanding of accounting teachers about anti-corruption education at SMK Negeri Makassar City's accounting expertise program. The variable of this research is the understanding of anti-corruption education on teachers. The population in this study was the Head of Accounting Skills Competence, Accounting Teachers, and Principals, while the samples in this study were the Heads of Accounting Skills Competencies, Accounting Teachers and Principals of State Vocational High Schools with Accounting Skills Programs in Makassar City which were taken with the Snow ball sampling technique. Data was collected using interviews, documentation, and questionnaires. Data analysis was carried out with qualitative descriptive. The results of this study indicate that the understanding of accounting teachers about anti-corruption education is quite good, although the results are not maximal enough because there are still students who practice corruption. The average value of anti-corruption education at SMK Negeri Makassar city's accounting expertise program is 92.70%, indicating that the values of anti-corruption education have been applied. Anti-corruption education does not yet exist at the vocational level but it is the same as character education because anti-corruption education is part of character education. The implementation of anti-corruption education into accounting learning is carried out by incorporating anti-corruption educational values into teaching and learning activities, inserting accounting learning, curriculum, and Learning Device Design (RPP) and Syllabus. Barriers to teachers in cultivating anti-corruption education are the difficulty of realizing the value of anti-corruption education due to limited face-to-face learning as well as the results of the implementation of anti-corruption education taking a long time, too many students to pay attention to, and the innate character from within and the student's social environment. . Accounting teachers work together with all parties in schools, carry out routine habituation activities, one of which is providing and procuring literacy related to religious knowledge, providing motivation by accounting teachers, collaboration with the environment (seminars and activities outside of school), adequate facilities and infrastructure, effective learning resources and school rules and regulations, are efforts that have been made at this time.

**Keywords: Understanding Teachers, Education Anti-Corruption.**

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan, untuk mengetahui pemahaman guru-guru akuntansi tentang pendidikan anti korupsi pada SMK Negeri program keahlian akuntansi Kota Makassar. Variabel penelitian ini adalah Pemahaman pendidikan Anti Korupsi pada guru. Populasi pada penelitian ini adalah Ketua Kompetensi Keahlian Akuntansi, Guru Akuntansi, dan Kepala Sekolah, sedangkan sampel pada penelitian ini adalah Ketua Kompetensi Keahlian Akuntansi, Guru Akuntansi dan kepala sekolah SMK Negeri yang Memiliki Program Keahlian Akuntansi di Kota Makassar yang diambil dengan teknik *Snow ball sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, dokumentasi, dan kuesioner. Analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan, pemahaman guru-guru akuntansi tentang pendidikan anti korupsi cukup baik, meskipun hasilnya belum cukup maksimal karena masih ada peserta didik yang melakukan sikap korupsi. Rata-rata dari nilai-nilai pendidikan anti korupsi pada SMK Negeri program keahlian akuntansi kota Makassar sebesar 92,70% menunjukkan bahwa nilai-nilai pendidikan anti korupsi telah diterapkan. Pendidikan anti korupsi belum ada pada tingkat SMK tetapi sama saja dengan pendidikan karakter karena pendidikan anti korupsi bagian dari pendidikan karakter. Pengimplementasian pendidikan anti korupsi kedalam pembelajaran akuntansi dilakukan dengan memasukkan nilai-nilai pendidikan anti korupsi kedalam perangkat kegiatan belajar mengajar, menyelipkan dalam pembelajaran akuntansi, kurikulum, dan Rancangan Perangkat Pembelajaran (RPP) dan Silabus. Hambatan guru dalam penanaman pendidikan anti korupsi yaitu sulitnya merealisasikan nilai pendidikan anti korupsi disebabkan pembelajaran tatap muka yang terbatas sekaligus hasil dari implementasi pendidikan anti korupsi membutuhkan waktu lama, terlalu banyaknya siswa yang harus diperhatikan, dan adanya karakter bawaan dari dalam diri dan lingkungan pergaulan anak didik. Guru akuntansi bekerja sama dengan semua pihak di sekolah, melakukan kegiatan rutin pembiasaan salah satunya pemberian dan pengadaan literasi yang mengaitkan dengan ilmu agama, pemberian motivasi oleh guru akuntansi, kerjasama dengan lingkungan (seminar dan kegiatan diluar sekolah), sarana dan prasarana yang cukup memadai, sumber belajar yang efektif serta peraturan tata tertib sekolah, merupakan upaya yang telah dilakukan saat ini.

### **Kata Kunci: Pemahaman Guru, Pendidikan Anti Korupsi**

---

#### **PENDAHULUAN**

Korupsi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi Indonesia stagnan sebagai negara berkembang. Karena kerugian-kerugian yang diberikan menghambat pembangunan negara dan menghancurkan sistem ekonomi negara, demokrasi, politik, hukum, pemerintahan bahkan tatanan

sosial masyarakat. Bahkan, semakin berkembang hingga masa dinamika demokrasi abad pertengahan ke-21 Indonesia, di bungkus dengan permasalahan Covid-19 dan Invasi Rusia-Ukraina dan semakin masif, mengingat penanganan dan penerapan hukumnya begitu tumpang tindih,

prosesnya terbilang sangat lambat lalu, tidak terdapat ketegasan yang murni.

Dalam lingkup pemerintah sendiri, pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menjadi nilai pertanggungjawaban kinerja mereka, kepada masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, dikhususkan untuk memproses segala tindak pidana korupsi yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 merupakan perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002.

Sebuah lembaga pemerintah yang mendayaguna inipun, kembali diguncang secara struktural dan dibuat kontradiktif. Sehingga pendiriannya seakan tidak relevan dan mempengaruhi Indeks kerjanya, yang dari tahun ketahun terus menurun dan cenderung kontroversial. “Tahun 2020 Indonesia berada diperingkat 102 dari 180 negara yang disurvei mengalami penurunan sebanyak tiga poin, dari 40 ke 37. Nilai IPK 37 masih sama dengan yang diperoleh Indonesia tahun 2016, hal ini masih membuat Indonesia dipersepsikan sebagai negara korupsi. (Transparansi Internasional, 2020).

*Indonesia Corruption Watch* (ICW), memberdayakan istilah Tren Penindakan Kasus Korupsi ditahun 2018 yang masih bertahan hingga kini. Terkait masalah pelayanan publik berupa pembagian informasi (transparansi data) kasus korupsi dan beragam pengenalan upaya pencegahan korupsi. Kurikulum Pendidikan karakter yang bersinggungan dengan Pendidikan Anti korupsipun belum dapat terealisasi dengan baik. Bahkan, sejauh yang diketahui, Lembaga

pendidikan tidak luput dari kepongkapan korupsi. Pada Tahun 2016-2021, di sektor Pendidikan sendiri tercatat kedalam lima besar kasus korupsi terbanyak yang ditindak oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Sehingga, kenyataan semakin mengias sisi positif Lembaga Pendidikan sebagai payung yang dapat memberikan pemahaman terhadap tindakan korupsi.

Salah satu untuk mengurangi tindakan korupsi yaitu melalui pendidikan anti korupsi yang dicanangkan oleh pemerintah sebagai upaya dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Menurut Agus Wibowo (2013:35) yang juga mengemukakan bahwa “Pendidikan dapat berperan secara tidak langsung dalam membasmi korupsi dengan mengaitkan materi pembelajaran dalam konteks pesan-pesan tentang korupsi”.

Didalam sebuah Lembaga Pendidikan, terbentuk sebuah struktur kompetensi yang menuntut profesi yang disebut guru untuk merealisasikan cita-cita dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yang tertuang dalam Undang-undang dasar 1945, yang terbagi dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C (1), Pasal 31 dan Pasal 32. Yang artinya, Pendidikan menjadi sektor yang cukup penting dalam pembangunan sebuah negara.

Disebut sebagai sebuah profesi karena merupakan suatu jabatan yang membutuhkan keahlian dan memiliki kode etik. Artinya Guru ialah suatu jabatan dalam suatu institusi yang menerima dan menjalankan seperangkat tugas dan kewajiban. Tugas dan kewajiban guru kemudian disebutkan dalam Undang-undang

Nomor 14 Tahun 2005, Tentang guru dan dosen. Guru disebutkan sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih serta menilai dan mengevaluasi peserta didik

Meskipun sistem Pendidikan Kejuruan memiliki kurikulum yang sedikit berbeda karena merupakan Pendidikan kesiapan kerja. Namun, termasuk dalam bagian wajib belajar 12 tahun di Indonesia. Sehingga, membutuhkan Tenaga Pendidik atau Guru dengan kategori yang disesuaikan dengan kejuruan, budaya dan pengalaman yang dibutuhkan sesuai visi dan misi Institusi yang mengembannya. Contohnya saja Akuntansi. Terdapat beberapa Sekolah kejuruan Akuntansi yang tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk diwilayah kota Makassar.

Sekolah Menengah Kejuruan Akuntansi ini, melatih siswanya menjadi calon keuangan dan tenaga akuntan. Karena pembelajaran akuntansi adalah dasar keangkuntansian, mereka dipersiapkan untuk terjun ke dunia kerja secara langsung untuk memberikan informasi tentang laporan keuangan dan lain sebagainya. Akuntansi berperan sebagai fungsi pengawasan dan perencanaan. Profesi akuntan pada bidang keuangan merupakan jantung perusahaan yang berhubungan dengan rupiah atau mata uang, sehingga dekat dengan korupsi. Haryono Umar (2011:122) menjelaskan peran akuntan dalam pemberantasan korupsi “Akuntan berperan dalam upaya pemberantasan

korupsi dengan membantu dalam audit investigasi, audit forensik, penghitungan kerugian negara, dan mengumpulkan informasi yang dapat digunakan sebagai alat bukti oleh lembaga penegak hukum serta berkontribusi penting dengan memberikan informasi ahli kepada penyidik dan hakim dalam menuntut kasus korupsi”. Namun Kenyataannya, sebagian besar korupsi yang terjadi diranah pemerintah dan beberapa sektor publik entah itu negeri atau swasta, terdakwa yang berprofesi sebagai akuntanlah yang terbanyak.

Contoh kecilnya saja, Pada Tahun 2010, terdakwa bernama Gayus HP Tambunan. Dia berprofesi sebagai Akuntan di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Indonesia dan tahun 2021 bernama Dewi Susiana Effendy, seorang Akuntan di Bank NTT, cabang Surabaya. dan masih banyak lagi kasus lainnya. Belum lagi, kasus-kasus korupsi yang mengepung Lembaga Pendidikan yang melibatkan akuntan pendidik. Begitu mencoreng dunia Pendidikan khususnya profesi akuntansi sendiri yang memiliki peran dan fungsi pengawasan. Sehingga, penerapan Pendidikan Anti korupsi di ranah Pendidikan khususnya akuntansi perlu diperbaharui, dikelola dan diterapkan secara maksimal untuk menciptakan generasi-generasi yang bebas korupsi.

Sebagaimana yang dipaparkan oleh Handoyono (2013:43), bahwa “Pendidikan anti korupsi merupakan upaya sadar dan terstruktur yang ditanamkan kepada peserta didik seperti pengetahuan, nilai, sikap, dan keterampilan yang diperlukan agar

terciptanya pribadi yang cakap dan mau menciptakan peluang untuk mencegah dan memberantas korupsi”. Yang terkandung dalam pendidikan anti korupsi oleh Hengki, dkk (2020:11) bahwa “Pendidikan anti korupsi memberikan pengetahuan tentang korupsi, mencegah terjadinya korupsi dan upaya untuk menumbuhkan integritas nilai anti korupsi sejak dini”.

Dalam penyelenggaraan pendidikan Anti korupsi harus diselaraskan atau diintegrasikan kedalam kurikulum wajib yang diberlakukan yaitu kurikulum 2013 secara baik, jelas, terbukti maupun tersirat. Sehingga diharapkan, setiap guru memiliki pemahaman yang baik tentang korupsi dan anti korupsi serta memiliki kemampuan dan kecakapan sebagai komunikator, fasilitator dan motivator yang baik, bagi anak didiknya. Mukodi, ddk (2019:9) dalam bab Persepsi dan materi pendidikan anti korupsi menerangkan bahwa, “Dalam pendidikan anti korupsi guru diharapkan menampilkan sikap dan mempraktikkan perilaku kejujuran, kemandirian, kedisiplinan, kerja keras, kesederhanaan dalam keseharian, kepedulian dan tanggung jawab terhadap teman sejawat, lalu keberanian dalam mengambil kebijakan, serta keadilan dalam memutuskan sesuatu yang semuanya merupakan nilai dari pendidikan anti korupsi”.

Namun, kenyataannya rancangan Perangkat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) guru tidak membahas secara spesifik tentang pendidikan anti korupsi, sulitnya penyesuaian materi karena tidak

terintegrasi di semua mata pelajaran hanya terintegrasi pada mata pelajaran PPKN dan Pendidikan Agama yang merupakan Implementasi Kurikulum 2013, sulitnya merealisasikan nilai pendidikan anti korupsi oleh guru disebabkan pembelajaran tatap muka yang terbatas sekaligus hasil dari implementasi pendidikan anti korupsi membutuhkan waktu lama.

Maka dari itu, Berdasarkan uraian tersebut diatas. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian, dengan judul : **“Pemahaman Pendidikan Anti Korupsi Pada Guru Akuntansi Smk Negeri Program Keahlian Akuntansi Kota Makassar”**.

## **METODELOGI PENELITIAN**

Penelitian yang digunakan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri Makassar yang memiliki Program Keahlian Akuntansi. Jenis dan sumber datanya berasal dari data primer dan sekunder, sumber data didapatkan dari informan atau narasumber yang mempunyai pemahaman berkaitan dengan masalah dalam penelitian.

Variabel dalam penelitian ini adalah pemahaman pendidikan anti korupsi pada guru. Populasi pada penelitian ini yaitu kepala sekolah, guru Akuntansi, ketua kompetensi keahlian akuntansi yang ada di SMK Negeri yang memiliki program keahlian akuntansi di Kota Makassar. Sampel pada penelitian ini adalah kepala sekolah, guru akuntansi, ketua kompetensi keahlian akuntansi SMK Negeri yang Memiliki program Keahlian Akuntansi di kota Makassar. Adapun SMK yang di maksud adalah

SMK Negeri 1 Makassar, SMK Negeri 4 Makassar, SMK Negeri 6 Makassar, SMK Negeri 7 Makassar. Teknik pengambilan sampel dengan *Snowball Sampling*, Pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi dan kuesioner. Teknik analisis datanya mengacu pada teknik analisis data menurut Milles dan Huberman yang mempunyai tiga tahap yaitu, Reduksi Data, Model Data (Data Display), dan Penarikan/verifikasi kesimpulan. Pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN GAMBARAN UMUM

SMK Negeri yang memiliki program keahlian akuntansi di kota Makassar merupakan sekolah negeri yang sangat diminati oleh masyarakat,

**Tabel 1 Data Informan Kunci (Ketua Kompetensi Keahlian Akuntansi), Informan Utama (Guru Akuntansi), Informan Tambahan (Kepala Sekolah atau yang Mewakili)**

Nama Sekolah	K3 Akuntansi	Guru Akuntansi	Kepala Sekolah/Wakasek
SMK Negeri 1 Makassar	Emi Wulandari, S.Pd., M.M	Cristian Eni Yunus, S.E	Drs. Kasrun Kasiran, M.Pd (Kepala Sekolah)
SMK Negeri 4 Makassar	Sato, S.Pd.,M.M.Pd	Fadlia Aprianirukkah, S.Pd	Drs. H. Muhammad Nur M.Pd (Wakasek SDM)
SMK Negeri 6 Makassar	Niswa, SE,. M.M	Karmila M, S.Pd	Santri Sabarianti, S.Pd., M.Pd (Wakasek Kurikulum)
SMK Negeri 7 Makassar	Fatimah, S.Pd	Camba Kati, S.Pd	Drs. Baso Daeng, M.M (Wakasek Kurikulum)

Sumber : SMK Negeri Program Keahlian Akuntansi di Kota Makassar

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan wawancara, dokumentasi, dan

Sekolah dalam kategori unggulan. Sampai saat ini telah mengukir beberapa prestasi sebagai sekolah yang berbasis kejuruan dan berbasis kompetensi yang benar-benar fungsional, untuk melaksanakan pekerjaan sampai tuntunan lapangan kerja. Lokasi yang cukup strategis dan mudah dijangkau. SMK Negeri tersebut memiliki visi dan misi, sarana dan prasarana yang cukup memadai serta guru-guru yang kompeten dibidangnya masing-masing.

## ANALISIS DATA

Berikut adalah nama-nama informan SMK Negeri yang memiliki program keahlian akuntansi di kota Makassar yang menjadi sumber data pada penelitian.

kuesioner. Penelitian mengambil sampel 4 SMK Negeri yang memiliki program keahlian akuntansi di Kota

Makassar. Dari setiap SMK Negeri yang telah diambil data dan di wawancarai, narasumber sebagai informan itu adalah K3 Akuntansi sebagai informan kunci, Guru akuntansi sebagai informan utama, dan kepala sekolah atau yang mewakili jika kepala sekolah sedang tidak berada di tempat sebagai informan tambahan.

Dokumentasi, di ambil oleh peneliti seperti rekaman hasil wawancara, data-data sekolah, letak sekolah, sarana dan prasaranan, peraturan sekolah, keadaan guru, jumlah siswa serta RPP dan silabus yang digunakan guru akuntansi dalam mengajar. Pemberian kuesioner oleh

peneliti kepada guru akuntansi untuk melihat pengintegrasian pendidikan anti korupsi pada SMK Negeri yang memiliki program keahlian Akuntansi di kota Makassar. Dalam hal ini ada 9 indikator yang menyangkut nilai-nilai pendidikan anti korupsi seperti nilai kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian dan keadilan dan dijabarkan dalam 34 pernyataan yang kemudian disebar di 4 SMK negeri yang meemiliki program keahlian akuntansi di Kota Makassar. Adapun hasil jawaban responden dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2 Rekapitulasi Hasil Jawaban Responden**

No.	Indikator Penilaian nilai-nilai Anti Korupsi	SMK Negeri 1 Makassar		SMK Negeri 4 Makassar		SMK Negeri 6 Makassar		SMK Negeri 7 Makassar		Jumlah	%
		1	2	1	2	1	2	1	2		
		1	Kejujuran	4	4	4	4	4	4		
2	Kepedulian	4	3	4	2	4	3	4	2	26	81,25
3	Kemandirian	2	2	3	3	3	3	2	2	20	62,5
4	Kedisiplinan	4	4	4	4	2	4	4	4	30	93,75
5	Tanggung Jawab	4	4	4	4	3	4	4	4	31	96,87
6	Kerja Keras	4	4	4	4	4	4	4	4	32	100
7	Sederhana	4	4	4	4	4	4	4	4	32	100
8	Keberanian	4	4	4	4	4	4	4	4	32	100
9	Keadilan	4	4	4	4	4	4	4	4	32	100
Jumlah		67		68		66		66		267	
Skor Maks		72		72		72		72			
%		93,05		94,44		91,66		91,66			
Rata-rata		92,70%									

Sumber: Hasil Olah Data Kuesioner, 2022

Berdasarkan tabel diatas pada SMK Negeri 1 Makassar dengan tingkat persentase yaitu 93,05%. Kemudian SMK Negeri 4 Makassar yang memiliki tingkat presentase

tertinggi yaitu 94,44% dan SMK Negeri 6 Makassar yang memiliki tingkat persentase 91,66%. Begitupun juga dengan SMK Negeri 7 Makassar yang memiliki persentase 91,66%.

Responden sebanyak 4 sekolah yang terdiri dari guru akuntansi dan ketua kompetensi keahlian akuntansi SMK Negeri yang memiliki program keahlian akuntansi di kota Makassar dengan kategori presentase tingkat rata-rata persentase 92,70% berdasarkan pengumpulan data dilakukan menggunakan lembar kuesioner (Sugiono, 2012) berskala Guttman

menunjukkan seberapa besar nilai-nilai pendidikan anti korupsi telah diterapkan dan tergolong efektif Yasmiami (2021).

Berikut hasil analisa data yang di wawancara dari setiap SMK Negeri yang memiliki program keahlian akuntansi di kota Makassar yang telah diambil dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3 Hasil Analisa Data**

Keterangan	Analisa Data
Nilai-nilai Pendidikan Anti Korupsi	Rekapitulasi hasil jawaban responden pada SMK Negeri yang memiliki program keahlian akuntansi di kota Makassar dengan tingkat rata-rata persentase 92,70% ini menunjukkan bahwa nilai-nilai pendidikan anti korupsi telah diterapkan.
Pemahaman terhadap pendidikan anti korupsi	Menurut narasumber pendidikan anti korupsi adalah pemberian pembelajaran pemahaman untuk tidak melakukan korupsi dan menanamkan nilai-nilainya dalam kehidupan. Pendidikan anti korupsi secara khusus belum ada pada tingkat SMK. Tetapi guru akuntansi Pada SMK Negeri yang Memiliki Program Keahlian Akuntansi di Kota Makassar telah memahamai tentang pendidikan anti korupsi karena tidak berbeda jauh dengan pendidikan karakter, bahkan menyelipkannya kedalam pembelajaran dan nilai-nilai pendidikan anti korupsi telah tertuang dalam Silabus dan RPP yang dibuat oleh guru.
Perilaku korupsi yang dilakukan siswa	Terdapat perilaku korupsi yang dilakukan siswa yaitu, korupsi terhadap waktu pelajaran.
Nilai-nilai karakter pendidikan anti korupsi	Guru akuntansi mengajari dan mendidik siswanya dengan mengaitakan nilai-nilai pendidikan anti korupsi sejak dini seperti kejujurannya dari pertama awal setiap belajar ditanamkan yang namanya kejujuran, ditanamkan kedisiplinan seperti kedisiplinan waktu dan tugas, kemandirian dalam mengerjakan tugas dalam belajar, kesederhanaan dalam mengerti yang namanya ilmu akuntansi, dan akan menjadi tanggung jawab peserta didik kelak, sejauh mana kepeduliannya terhadap jurusannya, nilai keadilan yang akan dilakukan dalam mengerjakan akuntansi dengan perilaku anti korupsi itu harus seimbang dengan keadilannya, dengan kerja keras untuk bisa



menuju kesuksesan dan yang terakhir adalah keberanian karena jika peserta didik tidak berani nilai-nilai pendidikan anti korupsi lainnya tidak dapat dilakukan

---

Integrasi pendidikan anti korupsi dalam mata pelajaran akuntansi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pendidikan anti korupsi dapat diintegrasikan kedalam pembelajaran akuntansi. Karena siswa Jurusan Akuntansi pada SMK di persiapkan terjuan langsung pada bidang keuangan dan penerapannya dalam hal terintegrasi dan secara spesifik di Pembelajaran PPKN.</li><li>- Dalam pembelajaran akuntansi peserta didik telah memperoleh materi siklus akuntansi mulai kejadian atau peristiwa yang memiliki nilai uang yang selanjutnya dicatat di jurnal, diposting ke buku besar, diikhtisarkan dalam neraca saldo, kemudian dilaporkan dalam laporan keuangan. Siklus akuntansi sederhana tersebut sebenarnya telah menjawab bagaimana arus uang dalam suatu aktivitas entitas.</li><li>- Cara yang dilakukan guru akuntansi dalam menerapkan nilai-nilai karakter akuntansi dengan memasukkan kedalam kurikulum, menyelipkannya kedalam perangkat pembelajaran seperti pada Silabus dan RPP, Penerapan fungsi-sungsi manajemen yang terdiri dari Planning, organizing, actuating, and controlling atau POAC untuk memberikan control terhadap penata pembukuan yang baik membatu budaya anti korupsi yang efektif dalam memberikan nilai karakter anti korupsi.</li></ul>
Kendala yang di alami guru akuntansi dalam penanaman pendidikan anti korupsi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rancangan Perangkat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) guru tidak membahas secara spesifik tentang pendidikan anti korupsi,</li><li>- Sulitnya penyesuaian materi karena tidak terintegrasi di semua mata pelajaran hanya terintegrasi pada mata pelajaran PPKN dan Pendidikan Agama yang merupakan Implementasi Kurikulum 2013,</li><li>- Sulitnya merealisasikan nilai pendidikan anti korupsi oleh guru disebabkan pembelajaran tatap muka yang terbatas sekaligus hasil dari implementasi pendidikan anti korupsi membutuhkan waktu lama.</li></ul>
Hambatan yang dihadapi guru akuntansi dalam penanaman pendidikan anti korupsi ke siswa.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Karakter bawaan dalam diri siswa</li><li>- Terlalu banyaknya siswa yang harus di amati yang memiliki karakter-karakter yang berbeda-beda,</li></ul>

---

	- Pergaulan bawaan dari lingkungannya yang membentuk karakter anak didik yang sudah sangat meluas yang tidak dapat dicegah.
Upaya yang dilakukan SMK Negeri untuk mengatasi hambatan dan kendala	Bekerja sama dengan semua guru, Kegiatan rutin pembiasaan pemberian dan pengadaan literasi yang mengaitkan dengan ilmu agama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing peserta didik, pemberian motivasi guru akuntansi, melalui kegiatan yang diprogramkan sekolah dalam rencana sekolah, bekerja sama dengan lingkungan mengadakan seminar dan kegiatan diluar sekolah dan mewajibkan tambahan atribut di seragam putih abu-abu siswa yang bertuliskan “Aku benci korupsi dan Aku benci narkoba”, sarana dan prasarana yang cukup memadai, sumber belajar yang efektif serta peraturan tata tertib sekolah yang mendukung lancarnya pengintegrasian pendidikan anti korupsi ini.

Sumber : SMK Negeri yang memiliki program keahlian akuntansi di Kota Makassar

## PEMBAHASAN

Pada dasarnya kompetensi dari pendidikan anti korupsi telah terintegrasi secara alami atau naluriah pada seluruh metode pembelajaran sekolah. Misalnya saja, pada nilai kejujuran: standar kompetensi yang diterapkan untuk membentuk sikap perilaku anti korupsi dan biasanya di tampilkan oleh guru dikesehariannya dalam proses belajar mengajar dan berinteraksi dengan siswa. Hal yang dinilai dari sikap tersebut adalah pembiasaan perilaku kejujuran, tidak berbohong dan natural. Responden sebanyak 4 sekolah yang terdiri dari guru akuntansi dan ketua kompetensi keahlian akuntansi SMK Negeri yang memiliki program keahlian akuntansi di kota Makassar, berdasarkan kategori presentase dengan tingkat rata-rata persentase 92,70% pengumpulan data dilakukan menggunakan lembar

kuesioner berskala Guttman menunjukan seberapa besar nilai-nilai pendidikan anti korupsi telah diterapkan dan tergolong efektif yang sejalan dengan penelitian Yasmianti (2021).

Salah satu hal penting untuk mengurangi tindakan korupsi yaitu melalui pendidikan. Pendidikan dapat mengubah perilaku manusia yang buruk menjadi positif. Pendidikan merupakan upaya normative yang mengacu pada nilai-nilai luhur yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, dan nilai-nilai tersebut terus berlanjut melalui perannya dari segi kognitif, efektif, dan psikomotorik. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dituliskan oleh Agus Wibowo (2013:35) bahwa pendidikan dapat berperan secara tidak langsung dalam membasmi korupsi.

Secara umum tujuan pendidikan merupakan isu sentral pendidikan dan

inti dari semua faktor yang sangat mempengaruhi jalannya pendidikan. Sejalan dengan teori yang di kemukakan oleh Halimang (2020:84) yang menuliskan tentang pentingnya menerapkan pendidikan anti korupsi di sekolah. Sekolah menjadi salah satu lembaga pendidikan yang dapat menerapkan karakter nilai-nilai pendidikan anti korupsi melalui pengajaran dan pembelajaran. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Eny Suprpti, dkk (2021) yang mengemukakan tentang peran utama guru dalam pendidikan anti korupsi dan dilakukan dengan dengan cara menyelipkan kedalam kurikulum, pembelajaran dan melakukan pembiasaan yang konsisten terus menerus berlanjut, memasukkan nilai-nilai pendidikan anti korupsi kedalam Perangkat Kegiatan belajar serta hal ini juga tertuang dalam panduan penyusunan dari kemendiknas tentang pengimplementasian pendidikan anti korupsi dalam kurikulum yang dijelaskan dalam tabel di tinjauan pustaka.

Pendidikan anti korupsi dimulai dari pemahaman pendidikan anti korupsi pada guru akuntansi dalam memberikan materi pembelajaran. Karena akuntansi berhubungan dengan perhitungan uang yang sangat dekat dengan korupsi dan juga dalam pembelajaran akuntansi mampu menjaga perusahaan dari penyelewengan karena adanya rutin melakukan pelaporan, bisa terlihat laba rugi, neraca, arus kas. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nurhayati, dkk (2015) tentang Pentingnya Planning, Organizing, Actuating,

controlling dalam memberikan kontrol untuk bisa mengantisipasi korupsi. Untuk mencegah korupsi, akuntan memainkan peran kunci dalam menyediakan informasi akuntansi yang kredibel. Selain itu, Akuntansi juga bertanggung jawab untuk menghitung konsekuensi dari bagian kriminal korupsi. Pengukuran dampak korupsi menjadi dasar bagi lembaga penegak hukum dan peserta didik untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan untuk memberantas dan mencegah korupsi. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Haryono Umar (2011:122) yang menjelaskan tentang peran akuntan dalam pemberantasan korupsi. sehingga pemahaman guru akuntansi tentang Pendidikan anti korupsi sangat penting meskipun hanya menyelipkannya dalam pembelajaran.

Dalam pelaksanaan penanaman nilai pendidikan anti korupsi guru akuntansi pada SMK Negeri yang memiliki program keahlian akuntansi di kota Makassar mendapat berbagai hambatan salah satunya yaitu, sulitnya merealisasikan nilai pendidikan anti korupsi oleh guru akuntansi disebabkan pembelajaran tatap muka yang terbatas sekaligus hasil dari implementasi pendidikan anti korupsi membutuhkan waktu lama. Kendala dalam pengintegrasian pada siswa yaitu, keterbatasan guru dalam memperhatikan satu persatu karakter anak didiknya yang banyak dan karena karakter mereka sudah terbentuk dari lingkungan sebelum memasuki sekolah.

Namun, upaya yang dilakukan guru akuntansi SMK Negeri yang

memiliki program keahlian akuntansi Kota Makassar untuk mengatasi kendala tersebut yaitu bekerja sama dengan semua Guru BK, Guru Agama dan berbagai pihak yang ada disekolah, serta orang tua siswa. Pada SMK Negeri 1 dan 4 Makassar melakukan pemberian motivasi dengan mendatangkan narasumber yang memiliki latar belakang luar biasa seperti dari kejaksaan dan kepolisian untuk bersosialisasi tentang anti korupsi. Ini dilakukan sekolah supaya peserta didik lebih leluasa berinteraksi dan pemahamannya tentang korupsi dibangun dengan baik, sehingga pada akhirnya peserta didik mampu menanamkan nilai-nilai pendidikan anti korupsi dalam dirinya. Pada SMK Negeri 6 dan 4 Makassar juga melakukan pembiasaan guru seperti pemberian dan pengadaan literasi sebelum memulai pembelajaran yang berkaitan dengan ilmu agama. Pengadaan literasi sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut peserta didik dapat membantu memperbaiki karakter individu terlebih lagi setiap agama selalu mengajarkan hal-hal baik dan mengharamkan yang namanya korupsi. Sehingga, karakter nilai-nilai pendidikan anti korupsi lebih mudah di tanamkan dalam diri anak didik. Pemberian motivasi kepada peserta didik dan guru memberikan contoh yang baik juga. SMK Negeri 4 dan 7 Makassar memberikan dukungan dengan pemberian motivasi yang mewajibkan tambahan atribut di seragam putih abu-abu peserta didik yang bertuliskan “Aku benci narkoba, dan Aku benci Korupsi”. menurut guru akuntansi SMK Negeri 4

Makassar, sarana dan Prasarana yang efektif, perangkat pembelajaran, serta sumber belajar yang cukup memadai menjadi hal untuk mengatasi berbagai kendala dalam pengintegrasian pendidikan anti korupsi dalam pembelajaran, komitmen dari berbagai pihak mutlak diperlukan dalam hal sosialisasi kebijakan mengenai peran sekolah dan guru dalam memerangi korupsi yang menciptakan peserta didik yang anti korupsi di masa mendatang. Sejalan dengan penelitian Kristiono, dkk (2020) tentang hambatan dan upaya pengimplementasian nilai-nilai pendidikan anti korupsi di sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa pengintegrasian nilai-nilai pendidikan anti korupsi pada SMK Negeri yang memiliki program keahlian akuntansi di Kota Makassar sudah cukup maksimal.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang telah dituliskan pada bab-bab sebelumnya mengenai pemahaman pendidikan anti korupsi pada guru akuntansi SMK Negeri yang memiliki program keahlian Akuntansi di Kota Makassar, maka dapat disimpulkan:

1. Pemahaman pendidikan anti korupsi pada guru akuntansi cukup baik, meskipun hasilnya belum cukup maksimal karena masih ada peserta didik yang menunjukkan sikap korupsi. Implementasi nilai-nilai pendidikan anti korupsi pada SMK Negeri yang memiliki program keahlian akuntansi di kota Makassar dengan tingkat rata-rata persentase 92,70% ini menunjukkan bahwa

nilai-nilai pendidikan anti korupsi telah diterapkan.

2. Pengintegrasian pendidikan anti korupsi kedalam pembelajaran akuntansi pada SMK Negeri yang memiliki program keahlian akuntansi di Kota Makassar berdasarkan analisis data penelitian, di sekolah tersebut belum ada pendidikan anti korupsi tetapi sama saja dengan pendidikan karakter karena pendidikan anti korupsi ini bagian dari pendidikan karakter itu sendiri. Secara teori nilai-nilai pendidikan anti korupsi sudah ada, cara yang dilakukan guru akuntansi dalam menerapkan nilai-nilai karakter akuntansi dengan memasukkan dan menyelipkan dalam pembelajaran berupa materi teori dalam RPP serta Silabus yang digunakan guru akuntansi sebagai pedoman dalam pembelajaran.
3. Berdasarkan analisis data penelitian kendala-kendala yang dialami oleh Guru akuntansi adalah Sulitnya merealisasikan nilai pendidikan anti korupsi oleh guru disebabkan pembelajaran tatap muka yang terbatas sekaligus hasil dari implementasi pendidikan anti korupsi membutuhkan waktu lama. Hambatan guru akuntansi dalam merealisasikan nilai pendidikan anti korupsi ke anak didiknya yaitu, karakter bawaan dalam diri peserta didik mulai dari terlalu banyaknya siswa harus di amati yang memiliki karakter-karakter yang berbeda-beda dan pada pergaulan bawaan dari lingkungannya yang membentuk karakter anak didik

yang sudah sangat meluas yang tidak dapat dicegah.

4. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu, Guru Akuntansi bekerja sama dengan berbagai pihak di sekolah seperti guru BK, Guru Agama, kepala sekolah serta orang tua siswa, Guru Akuntansi merumuskan secara eksplisit ke tiga aspek domain pendidikan (Keterampilan, Pengetahuan, dan Sikap), Kegiatan rutin pembiasaan pemberian dan pengadaan literasi yang mengaitkan dengan ilmu agama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing peserta didik, pemberian motivasi guru dan sekolah kepada peserta didik dengan mendatangkan narasumber dari kejaksaan dan kepolisian untuk bersosialisasi tentang anti korupsi dan mewajibkan tambahan atribut di seragam putih abu-abu siswa yang bertuliskan "Aku benci korupsi dan Aku benci narkoba", sarana dan prasarana yang cukup memadai, sumber belajar yang efektif serta peraturan tata tertib sekolah yang mendukung lancarnya pengintegrasian pendidikan anti korupsi tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka terdapat beberapa saran yang perlu dipertimbangkan bagi beberapa pihak untuk perbaikan bagi penelitian selanjutnya sekaligus bagi peneliti ini, sebagai berikut:

1. Untuk Sekolah  
Sekolah hendaknya memberikan kesempatan kepada setiap guru untuk mengikuti seminar pendidikan atau seminar pelatihan anti korupsi

agar guru dapat pengetahuan yang lebih mendalam.

2. Untuk Guru

Guru sebaiknya sering mempelajari tentang pendidikan anti korupsi agar memudahkan dalam membantu memasukkan nilai pendidikan anti korupsi kedalam bahan ajar mereka.

3. Untuk Pemerintah

Pemerintah juga harus mensosialisasikan tentang

pendidikan anti korupsi ke seluruh masyarakat agar seluruh rakyat Indonesia dapat secara optimal melaksanakan tujuan pendidikan anti korupsi, bukan hanya siswa yang bertindak, tetapi seluruh elemen masyarakat bertindak dalam memerangi korupsi.

### DAFTAR RUJUKAN

Agus, Wibowo. (2013). *Pendidikan Anti Korupsi Di Sekolah Strategi Internalisasi Pendidikan Anti Korupsi Di Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar

Departemen Pendidikan Nasional. (2003). *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Pusat Kurikulum Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional. <https://tatagy.files.wordpress.com/2007/10/01/kurikulum-berbasis-kompetensi-2004.pdf>

Dokumentasi. *Data Administrasi SMK Negeri 1,4,6,7 Makassar*. Tahun Ajaran 2021/2022. Makassar.

Eny, Suprpti, Priono, Thamrin, dan Baso R. (2021). *Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Akuntansi Sebuah Upaya Membentuk Siswa Akuntansi Berkarakter Antikorupsi (Studi Di Smk Negeri Jurusan Akuntansi Kabupaten Bayuwangi*. *Jurnal Pendidikan Akuntansi*, 6(1), 39-54. <http://ojs.stietdn.ac.id/index.php/TB/article/view/160>

Halimang, Dr. St. M.HI. (2020). *Pendidikan Anti-korupsi Pendekatan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: CV Bildung Nusantara.

Handoyono, E. (2013). *Pendidikan Anti Korupsi*. Yogyakarta: Ombak.

Hengki, M. P. S., Sahri, Subagio, Syafrizal, Bona P., Pratiwi B. P., Bonaraja R., dan Nurhilmayah. (2020). *Pengantar Pendidikan Anti Korupsi*. Medan: Yayasan kita Menulis.

Haryono, Umar. (2011). *Peran Akuntan Dalam Pemberantasan Korupsi*. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Sosio humaniora*: 13(1), 108-126, <http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/5465/0>.

- Ikatan Akuntan Indonesia. 2020. Kode Etik Akuntan Indonesia. Institut Akuntan Publik Indonesia dan Institut Akuntan Manajemen Indonesia didukung oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian keuangan: [Kode-Etik-Akuntan-Indonesia-2020-Penerbit-IAI.pdf \(ubico.id\)](#)
- Indonesia Corruption Watch. *Uang Untuk Gayus; Babak Baru Mafia Pajak?*. 20/12/2010. [Uang Untuk Gayus; Babak Baru Mafia Pajak? | ICW \(antikorupsi.org\)](#).
- Indonesia Corruption Watch. *KPK Siap Periksa Dugaan Korupsi Di Indofarma*. 15/7/2004. [KPK Siap Periksa Dugaan Korupsi Di Indofarma \[15/07/04\] | ICW \(antikorupsi.org\)](#)
- Indonesia Corruption Watch. *Tren Penindakan Kasus Korupsi*. Kumpulan Artikel yang dikeluarkan setiap tahun. [Search for tren | ICW \(antikorupsi.org\)](#)
- JDIH BPK RI. *Guru dan Dosen*. [UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen \[JDIH BPK RI\]](#).
- JDIH BPK RI. *Sistem Pendidikan Nasional*. [UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional \[JDIH BPK RI\]](#)
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi. 2011. *Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT).
- Kementerian Pendidikan Nasional, 2011, *Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Karakter*, Puskubruk:<https://123dok.com/document/z3d5rldy-pedoman-pelaksanaan-pendidikan-karakter.html>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Undang Undang Terkait*. [Tentang KPK - Undang-undang Terkait](#)
- Kristiono Natal , Indri Astuti, dan Hafiz Rafi Uddin. (2020). *Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di SMK Texmaco Pernalang*. *Jurnal Integralistik*, 31(1), 13-21. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/integralistik/article/view/216-18/10095>
- Mukodi, M.S.I, Haryono, M.Pd, dan Afid Baharuddin, M.Pd. (2019). *Active Learning 101 Cara Pembelajaran anti Korupsi di Sekolah*. Pacitan: LPPM Pres STKIP PGRI Pacitan

- Nurhayati, Umi, dan Nurul Anam. (2015). *Manajemen Pembelajaran pendidikan anti korupsi. Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 9(2), 67-91. <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri/article/download/2894/2141/>
- Safitri, Dewi. (2019). *Menjadi Guru Profesional*. Riau: PT. Indragiri Dot Com.
- Sugiono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Transparency Internasional Indonesia. (2021). *Siaran Pers*. Retrieved from transparency International Indonesia: <https://riset.ti.or.id/indeks-persepsikorupsi-2020-korupsi-respons-covid-19-dan-kemundurandemokrasi/?preview=true>. Januari 2021.
- Yasmiati, Ni Luh Wayan (2021). *Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi Bermuatan Kearifan Lokal Bali Pada Mata Pelajaran Ips Smp Di Kota Singaraja*. Masters thesis, Universitas Pendidikan Ganesha. <https://repo.undiksha.ac.id/6913/>
- Yusrianto, K. (2018). Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi. *Gorontalo Law Riview*, 1(1), 25-38. <https://jurnal.unigo.ac.id/index.-php/golrev/article/view/95>